

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay dilakukan oleh Kartika (2011) memberikan hasil bahwa total aset dan solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Sedangkan operasi kerugian dan keuntungan, profitabilitas, opini auditor, dan reputasi auditor tidak memiliki pengaruh terhadap audit delay.

Penelitian yang dilakukan oleh Innayati dan Susilowati (2015) yang berjudul pengaruh karakteristik perusahaan dan auditor terhadap audit delay menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, kompleksitas operasi perusahaan, reputasi KAP, dan opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Hal ini dikarenakan apabila total aset besar maupun kecil mempunyai kemungkinan yang sama dalam menghadapi tekanan atas penyampaian laporan keuangan, oleh karena itu auditor akan memeriksa perusahaan dengan total aset besar maupun kecil dengan cara yang sama sesuai dengan prosedur dalam standar profesional akuntan publik. Auditor telah memperhitungkan waktu yang perlu dalam perencanaan audit mengenai perubahan kompleksitas operasi suatu perusahaan, sehingga perubahan kompleksitas operasi perusahaan tidak mempengaruhi audit delay. Pendapat *unqualified opinion* dan *qualified opinion* tidak mempengaruhi audit delay dikarenakan auditor telah bekerja secara profesional dalam pelaksanaan audit., selain itu auditor telah melakukan prosedur dengan baik, sehingga opini apapun yang dikeluarkan auditor tidak akan mempengaruhi lamanya penyelesaian audit.

Penelitian lain mengenai audit delay dilakukan oleh Amani (2016) “pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, opini audit, dan umur perusahaan audit delay”. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, opini audit dan umur perusahaan berpengaruh simultan terhadap audit delay. Penelitian Dura (2017) dengan judul “pengaruh profitabilitas, likuiditas,

solvabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap audit report lag pada perusahaan yang terdaftar di BEI” menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap audit report lag mengindikasikan bahwa perusahaan mendapat profit besar cenderung melakukan proses audit lebih singkat dibanding perusahaan dengan profit kecil. Likuiditas berpengaruh terhadap audit report lag. Solvabilitas berpengaruh terhadap audit report lag mengindikasikan bahwa tingginya jumlah hutang yang dimiliki perusahaan akan menyebabkan proses audit yang relatif lebih panjang. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag mengindikasikan bahwa besar kecilnya jumlah aset yang dimiliki perusahaan mempunyai pengaruh panjang atau pendeknya proses penyusunan laporan keuangan pada perusahaan tersebut.

Sumartini dan Widhiyani (2014) penelitian dengan judul “pengaruh opini audit, solvabilitas, ukuran KAP, dan laba rugi pada *audit report lag*”. Teknik analisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit dan laba rugi tahun berjalan berpengaruh terhadap *audit report lag*, sedangkan variabel solvabilitas dan ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Pratiwi (2015) penelitian dengan judul “pengaruh komite audit independen, jumlah rapat dewan komisaris, profitabilitas, ukuran perusahaan, opini auditor, dan ukuran KAP terhadap *audit report lag*” menyatakan bahwa komite audit independen, profitabilitas, ukuran perusahaan, opini auditor, dan ukuran KAP berpengaruh terhadap *audit report lag*. Sedangkan, jumlah dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*.

Norwahida (2015) penelitian dengan judul “Signing Auditor Quality and Audit Delay: Preliminary Evidence” menyatakan bahwa kualitas mitra audit individual berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Hajiha dan Rafiee (2011) dengan penelitian yang berjudul “The Impact of Internal Audit Function Quality on Audit Delays” menunjukkan bahwa objektivitas dan kompetensi memiliki hubungan yang signifikan terhadap audit delay, namun ukuran audit internal tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap audit delay.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Auditing

Pengertian Auditing menurut Aren, et al., (2015: 2) adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi yang menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Pengertian *Auditing* menurut Hery (2016: 10) merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara objektif) bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengomunikasikan hasil kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Mulyadi (2013), *auditing* adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomis, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *auditing* adalah suatu proses sistematis yang dilakukan oleh pihak independen dan kompeten dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif yang berkaitan untuk menentukan apakah pihak-pihak yang diaudit sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, kemudian menginformasikan hasilnya kepada para pemakai laporan keuangan.

2.2.2 Standar Auditing

Standar Auditing menurut Mulyadi (2013: 16-17) sebagai berikut :

A. Standar Umum

1. Audit harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian atau pelatihan teknis cukup sebagai auditor.

2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi, dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan pelaporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama

B. Standar Pekerjaan Lapangan

1. Perkerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus di supervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyampaikan pendapat.

C. Standar Pelaporan

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan keuangan.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal ini nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan.

2.2.3 Jenis-Jenis Audit

Menurut Arens, et al., (2015: 12) Akuntan Publik melakukan tiga jenis utama audit yaitu :

1. **Audit Operasional (*Management Audit*)**
Mengevaluasi *efisiensi* dan *efektivitas* setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhirnya audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi untuk memperbaiki operasi. Sebagai contoh, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi pengujian dengan sistem komputer yang baru dipasang.
2. **Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)**
Dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pengguna luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan.
3. **Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)**
Dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah standar akuntansi Amerika Serikat atau Internasional, walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok dalam organisasi itu.

2.2.4 Tujuan Audit

Menurut Arens, et al., (2015: 168) menjelaskan bahwa tujuan audit adalah untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan oleh auditor, apakah

laporan keuangan yang disajikan secara wajar, dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Beberapa jenis tujuan audit diantaranya :

A. Tujuan audit terkait kelompok transaksi

Tujuan audit ini terkait dengan asersi manajemen. Pada dasarnya tujuan audit terkait transaksi membantu auditor untuk menemukan bukti audit yang memadai. Dalam tujuan audit ini terdapat tujuan umum dan tujuan khusus, perbedaannya adalah untuk tujuan audit khusus dapat diterapkan pada setiap kelompok transaksi akan tetapi harus dinyatakan dalam istilah yang disesuaikan dengan kelompok transaksi tersebut. Enam tujuan audit terkait transaksi diantaranya keterjadian (*occurrence*), kelengkapan (*completeness*), akurasi (*accuracy*), pemindahbukuan dan pengikhtisaran, klasifikasi (*classification*), dan penetapan waktu.

B. Tujuan audit terkait saldo

Tujuan audit ini mengikuti asersi manajemen dan memberikan kerangka kerja untuk membantu auditor untuk mengumpulkan bahan bukti yang memadai terkait saldo. Perbedaan antara tujuan audit saldo dan transaksi adalah audit terkait saldo diterapkan pada saldo akun seperti piutang dagang, persediaan dan lainnya bukan pada transaksi terkait seperti penjualan dan pembelian. Delapan macam tujuan audit terkait saldo diantaranya keberadaan (*existence*), kelengkapan (*completeness*), akurasi (*accuracy*), klasifikasi (*classification*), pisah batas (*cutoff*), keterkaitan perincian saldo akun, nilai realisasi, serta hak dan kewajiban (*right & obligations*).

C. Tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan

Tujuan audit ini mengikuti asersi manajemen dengan meningkatnya kompleksitas transaksi dan kebutuhan untuk meningkatkan pengungkapan terkait transaksi-transaksi yang dilakukan. Empat macam tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan diantaranya keterjadian dan hak serta kewajiban, kelengkapan, penilaian dan alokasi, klasifikasi dan pemahaman.

2.2.5 Fase Audit

Dalam memenuhi tujuan-tujuan audit, auditor harus mengikuti beberapa fase dalam pengauditan laporan keuangan. Fase ini merupakan dasar auditor memulai audit terhadap laporan keuangan entitas. Arens, et.al., (2015: 192) membagi jenis fase tersebut menjadi:

1. Fase I : Merencanakan dan merancang pendekatan audit.
2. Fase II : Menjalankan tes pengendalian dan substantif tes transaksi.
3. Fase III : Menjalankan prosedur analisis dan tes rician saldo.
4. Fase IV : Melengkapi audit dan menerbitkan laporan audit.

Didalam fase II-III auditor akan merangkum bukti-bukti audit untuk mencapai sebuah kesimpulan wajar atas laporan keuangan tersebut.

2.2.6 Jenis-Jenis Auditor

Auditor merupakan orang yang melakukan auditing. Jenis-jenis auditor berbeda-beda tergantung jenis audit yang dilakukannya. Beberapa jenis auditor antara lain (Arens, et al., 2015: 15) :

1. Kantor Akuntan Publik
Yang bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi nonkomersial yang lebih kecil. Kantor Akuntan Publik mencerminkan fakta bahwa auditor yang menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai akuntan publik.
2. Auditor Badan Akuntabilitas Pemerintah
Auditor yang bekerja untuk *Governance Accountability Office (GAO)*. Tanggung jawab GAO adalah melaksanakan fungsi audit bagi kongres, dan badan ini memikul banyak tanggung jawab audit yang sama seperti KAP. GAO mengaudit sebagian besar informasi keuangan yang disiapkan oleh berbagai badan pemerintah federal sebelum diserahkan kepada kongres. Karena kewenangan untuk melakukan pengeluaran dan penerimaan dalam badan-badan pemerintah ditetapkan oleh

hukum, dalam audit ini yang cukup besar diberikan pada kepatuhan atau ketaatan.

3. Agen Penerimaan Negara

IFRS dibawah arahan *Commissioner of Internasional Revenue*, bertanggung jawab untuk melakukan peraturan pajak federal, salah satu tanggung jawab IFRS adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut *internal revenue agent* (agen pemerintah negara).

4. Auditor Internal

Dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti GAO (*Governance Accountability Office*) mengaudit kongres. Untuk mempertahankan independensi dari fungsi-fungsi bisnis lainnya, kelompok audit internal biasanya melapor langsung kepada direktur utama, salah satu pejabat tinggi eksekutif lainnya, atau komite audit dalam dewan komisaris. Audit internal tidak dapat sepenuhnya Independen dari entitas itu selama masih ada hubungan antara pemberian kerja karyawan. Pengalaman melakukan audit internal dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan pengalaman agar menjadi akuntan publik, banyak auditor internal yang berusaha mendapatkan sertifikat sebagai *Certified Internal Auditor* (CIA).

2.2.7 Tanggung Jawab Auditor

Standar Auditing AICPA menyatakan bahwa tujuan auditor melakukan audit atas laporan keuangan, antara lain (Arens, et al., 2015: 170) :

1. Memperoleh keyakinan yang layak bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah bebas dari salah saji yang material, baik karena kecurangan maupun kesalahan, sehingga memungkinkan auditor untuk menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan itu

disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan kerangka kerja pelaporan keuangan yang berlaku.

2. Melaporkan tentang laporan keuangan, dan berkomunikasi seperti yang diisyaratkan oleh *standar auditing*, sesuai dengan temuan auditor.

2.3 Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan menurut Wardiah (2016: 89-90) adalah informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No.1 paragraf ke-7 (2015) laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Kasmir (2013: 7) laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan (financial statement) menurut Hery (2016: 5) adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.

2.3.2 Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang lengkap menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No. 1 (2015) terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode.

- b. Laporan laba rugi dari penghasilan komprehensif lain selama periode.
- c. Laporan perubahan ekuitas selama periode.
- d. Catatan atas laporan keuangan.
- e. Laporan posisi keuangan pada awal periode

Laporan Keuangan yang lengkap terdiri dari komponen berikut :

1. Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang sistematis meliputi aktiva yaitu kekayaan yang dimiliki perusahaan, hutang yaitu kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang belum dipenuhi, serta modal atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang dapat menunjukkan keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu.

2. Laporan Laba Rugi

Menurut Harahap (2011: 211) laporan laba rugi menggambarkan hasil yang diperoleh atau diterima oleh perusahaan selama satu periode tertentu, serta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil tertentu. Hasil dikurangi biaya-biaya merupakan laba atau rugi, jika hasil lebih besar dari biaya maka perusahaan mendapatkan laba dan jika hasil lebih kecil dari biaya maka perusahaan mengalami rugi.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut Sodikin dan Riyono (2014: 43), laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas perusahaan akibat operasi perusahaan dan transaksi dengan pemilik pada satu periode akuntansi tertentu. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No.1 (2015), laporan perubahan ekuitas menunjukkan:

- a. Total penghasilan komprehensif selama periode berjalan, yang menunjukkan secara tersendiri jumlah total yang

dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali.

- b. Untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif.
- c. Dikosongkan.
- d. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat di awal dan akhir periode, secara tersendiri mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari:
 1. Laba rugi.
 2. Penghasilan komprehensif lain.
 3. Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara tersendiri kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan pada entitas.

4. Laporan Arus Kas

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No.2 (2015) “Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan”.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No.1 (2015) :

- a. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan.
- b. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan dibagian manapun dalam laporan keuangan.
- c. Menyajikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.

2.3.3 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut Hery (2016: 6) adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Jenis keputusan yang dibuat oleh pengambilan keputusan sangatlah beragam, begitu juga dengan metode pengambilan keputusan yang mereka gunakan dan kemampuan mereka untuk memproses informasi. Penggunaan informasi akuntansi harus dapat memperoleh pemahaman mengenai kondisi keuangan dan hasil operasional perusahaan lewat laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 paragraf 12 (2015) menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik.

Secara lebih rinci, Kasmir (2013: 10), mengungkapkan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk:

- a. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- b. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- c. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
- d. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- e. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi aktiva, pasiva dan, modal perusahaan.
- f. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
- g. Memberikan informasi catatan-catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus

kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan terutama bagi manajemen suatu perusahaan.

2.3.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut (SAK) Standar Akuntansi Keuangan (2015: 5-7) karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu :

1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomik pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegakkan atau mengoreksi, hasil evaluasi menggunakan dimasa lalu.

3. Keandalan

Informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

4. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat dibandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*tren*) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antara entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan dengan kandungan informasi dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan dan dapat dibandingkan.

2.4 Audit Delay

Audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit (Halim, 2000). Ketepatanwaktuan laporan keuangan tergantung pada jangka waktu audit karena laporan keuangan tidak dapat diterbitkan sebelum audit selesai dilaksanakan. Semakin lama *audit delay* semakin tertunda informasi tersampaikan pada pengguna laporan keuangan.

Audit delay yang semakin panjang menyebabkan ketepatanwaktuan (*timeliness*) laporan keuangan semakin berkurang. Pengaruh dari ketepatanwaktuan yang semakin berkurang mengakibatkan informasi dalam laporan keuangan kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan (Kieso *et al.*, 2012).

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor:KEP-431/BL/2012 tentang Penyampian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Bapepam memperketat peraturan dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yaitu Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, disebutkan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan dan disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK/2016 pasal 7 ayat 1 yang berisi “Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan

keuangan tahunan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir”, sehingga perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (*go public*) wajib untuk mempublikasikan laporan tahunan setelah berakhirnya tahun buku periode tertentu.

Berdasarkan pada definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan audit delay adalah selisih waktu antara tanggal tutup buku laporan keuangan tahunan dengan tanggal dipublikasikannya laporan keuangan tahunan.

Menurut Dyer dan McHugh (1975) ada tiga kriteria keterlambatan, yaitu:

1. keterlambatan audit (Auditor's Signature Lag) yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani.
2. keterlambatan pelaporan (Preliminary Lag) yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan auditor ditandatangani sampai tanggal pelaporan oleh Bursa Efek.
3. keterlambatan total (Total Lag) yaitu interval jumlah hari antara tanggal periode laporan keuangan sampai tanggal laporan dipublikasikan oleh bursa.

Ketepatanwaktuan penerbitan laporan keuangan yang telah diaudit adalah hal yang penting terutama bagi perusahaan publik yang menggunakan pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan.

2.5 Opini Audit

Dalam audit laporan keuangan, *output* yang dihasilkan adalah laporan audit mengenai pendapat (opini) atas laporan keuangan perusahaan. Laporan audit merupakan alat formal untuk mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai apa yang telah dilakukan auditor dan kesimpulan yang dicapainya atas audit laporan keuangan (Arens, et al 2015: 68).

Menurut Johnstone, Gramling, Rittenberg (2014) ada lima jenis pendapat akuntan yaitu :

A. Opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)

Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Ini adalah pendapat yang dinyatakan dalam laporan auditor bentuk baku. Opini audit tersebut dapat dikeluarkan oleh perusahaan jika :

1. Tidak ada pelanggaran GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*)
2. Pengungkapan yang memadai.
3. Auditor mampu melakukan semua prosedur yang diperlukan.
4. Tidak ada perubahan prinsip akuntansi yang memiliki pengaruh material terhadap laporan keuangan.
5. Auditor tidak memiliki keraguan signifikan kepada klien mengenai *going concern*.
6. Auditor independen.

B. Opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)

Opini Wajar dengan pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Ada tiga situasi dimana seorang auditor mengeluarkan laporan *qualified opinion*, situasi itu terjadi ketika ada :

1. Suatu material yang tidak sesuai dengan GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*).

2. Pengungkapan yang tidak memadai dan tidak sesuai.
3. Keterbatasan ruang lingkup yang mengakibatkan tidak terdeteksinya salah saji dan bisa saja hal itu material.

C. Opini tidak wajar (*adversed opinion*)

Seorang auditor menerbitkan laporan yang tidak wajar ketika laporan keuangan memuat ketidak sesuaian dan materi yang tidak dibenarkan oleh GAAP, termasuk kurangnya sebuah pengungkapan penting. Pendapat yang tidak wajar harus diungkap ketika auditor yakin bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan GAAP.

Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan atau pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

D. Tidak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Opini tidak menyatakan pendapat (TMP) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Seorang auditor *disclaimer of opinion* dalam situasi berikut :

1. Keterbatasan ruang lingkup.
2. Keraguan substansial tentang kelangsungan hidup klien.
3. Auditor kurang independen.

2.6 Ukuran Perusahaan

2.6.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Menurut Riyanto (2008: 313) “ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva”.

Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar dari pada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya jika penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian (Brigham dan Houston, 2001).

Berdasarkan definisi-definisi diatas ukuran perusahaan merupakan besarnya aset yang dimiliki perusahaan, ditunjukkan oleh total aktiva, semakin besar aktiva (aset) perusahaan maka semakin cepat dalam melaporkan keuangannya dibandingkan dengan perusahaan dengan aktiva (aset) kecil.

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan log natural, jumlah aset dengan nilai ratusan miliar bahkan triliun akan disederhanakan, tanpa mengubah proporsi dari jumlah aset yang sesungguhnya. Ukuran perusahaan dihitung dengan *log natural* dari total aset. Perhitungan ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan rumus yaitu :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln}(\text{Total Asset})$$

2.6.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 ukuran perusahaan diklasifikasikan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut.

Kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No.20 tahun 2008 Pasal 6 adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak lima puluh juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak tiga ratus juta rupiah.

2. Kriteria Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari lima puluh juta rupiah sampai dengan paling banyak lima ratus juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari tiga ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak dua milyar lima ratus juta rupiah.
3. Kriteria Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari lima ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak sepuluh milyar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari dua milyar lima ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak lima puluh milyar rupiah.
4. Kriteria Usaha Besar memiliki kekayaan bersih lebih dari sepuluh milyar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari lima puluh milyar rupiah.

2.7 Profitabilitas

Munawir (2014: 33) mendefinisikan bahwa profitabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivitya secara produktif, dengan demikian profitabilitas perusahaan dapat diketahui dengan memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut.

Profitabilitas menurut Kasmir (2013: 196) adalah kemampuan untuk menilai perusahaan dalam mencari keuntungan, memberikan keuntungan tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan, hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Menurut Syamsuddin (2009: 90) “ukuran yang sering dipakai untuk menilai sukses atau tidaknya manajemen dalam mengelola perusahaan adalah laba

yang diperoleh oleh perusahaan, untuk menghitung laba dapat menggunakan rasio profitabilitas”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mencapai laba.

Rasio profitabilitas dapat diukur melalui beberapa indikator seperti, *gross profit margin, profit margin, net profit, return on assets, return on equity, return on investment, dan earning per share*.

Penelitian ini menggunakan perhitungan profitabilitas dengan *Return On Asset* (ROA), yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan tingkat aset tertentu. Profitabilitas mempengaruhi perusahaan yang mengumumkan rugi atau profitabilitas yang rendah.

Return On Asset (ROA) menurut Hery (2016: 192) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya, yang digunakan dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. *Return On Asset* dihitung dengan menggunakan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

2.8 Solvabilitas

Solvabilitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Raharjo, 2005: 121),

Menurut Sutrisno, (2001: 16), mendefinisikan tentang solvabilitas, yaitu: “solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya apabila perusahaan di likuidasi”. Solvabilitas merupakan

kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang (Hanafi dan Halim, 2012: 79).

Menurut Kasmir (2013 : 151) rasio solvabilitas atau leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiaya dengan hutang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi).

Menurut Fahmi (2012: 62), ada 5 ukuran untuk menentukan solvabilitas antara lain: *debt to total assets*, *debt to equity ratio*, *times interest earned*, *fixed charge coverage*, dan *interest earned*.

Dalam penelitian ini solvabilitas diukur dengan menghitung *debt to total asset* atau *debt to assets ratio* dengan membandingkan antara jumlah aktiva (total asset) dengan jumlah utang (baik jangka pendek maupun jangka panjang). Rasio ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana utang perusahaan dapat ditutupi oleh aktiva yang dimiliki serta mengidentifikasi tingkat kesehatan perusahaan. Perhitungan rasio atas aktiva atau *debt to asset ratio* (DAR) dihitung dengan rumus:

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

2.9 Hubungan antara variabel penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat (Sujarweni, 2015: 43).

2.9.1 Hubungan opini audit terhadap audit delay

Pada umumnya opini selain wajar tanpa pengecualian merupakan opini yang tidak diharapkan oleh semua manajemen. Semakin tidak baik opini yang

diterima perusahaan maka semakin lama laporan keuangan auditan dipublikasikan. Laporan keuangan yang disampaikan tidak tepat waktu mencerminkan ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan yang ada. Apriliane (2015) berpendapat bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Lain halnya penelitian yang menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, seperti Innayati dan Susilowati (2015). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menerima jenis pendapat *unqualified opinion* akan menunjukkan audit delay yang lebih singkat dibandingkan dengan perusahaan yang menerima pendapat *qualified opinion*.

Opini audit adalah pendapat yang diberikan oleh auditor independen atas laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Perusahaan yang menerima pendapat *unqualified opinion* cenderung akan melaporkan laporan keuangannya tepat waktu. Berbeda dengan perusahaan yang menerima pendapat selain *unqualified opinion*, perusahaan tersebut akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melaporkan laporan keuangannya. Opini audit yang baik (*unqualified opinion*) harus mengemukakan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan standar akuntansi dan tidak ada penyimpangan material yang dapat mempengaruhi pengambilan suatu keputusan.

2.9.2 Hubungan ukuran perusahaan terhadap audit delay

Ukuran perusahaan merupakan besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur berdasarkan ukuran nominalnya seperti dengan menggunakan jumlah kekayaan (total asset), jumlah penjualan dalam satu tahun periode penjualan, jumlah tenaga kerja, dan total nilai buku tetap perusahaan. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur berdasarkan besar kecilnya total asset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Perusahaan yang lebih besar mempunyai pengendalian internal yang lebih baik.

Perusahaan yang memiliki pengendalian internal yang lebih baik akan mempermudah auditor sehingga hal ini dapat mengurangi kesalahan auditor dalam mengerjakan laporan auditnya. Selain itu perusahaan yang lebih besar

cenderung memiliki tekanan eksternal yang lebih tinggi untuk menyelesaikan laporan auditnya secara tepat waktu karena dimonitor secara ketat oleh para investor, pemerintah, dan badan pengawas permodalan.

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari kekayaan atau total aset yang dimiliki perusahaan. Dura (2017) menyatakan bahwa besar kecilnya jumlah aset yang dimiliki perusahaan mempunyai pengaruh panjang atau pendeknya proses penyusunan laporan keuangan pada perusahaan tersebut yang berarti ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay, sedangkan menurut Innayati dan Susilowati (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan itu tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay.

2.9.3 Hubungan profitabilitas terhadap audit delay

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Perusahaan yang mengalami tingkat profitabilitas rendah (*bad news*) akan menunda penerbitan laporan keuangan dan meminta auditor untuk menjadwalkan pengauditan lebih lambat dari biasanya (Kartika, 2011). Hal ini disebabkan karena perusahaan yang mengumumkan tingkat profitabilitas rendah akan membawa reaksi negatif dari pasar dan penilaian kinerja perusahaan tersebut akan menurun.

Perusahaan yang mengalami tingkat profitabilitas tinggi cenderung mengharapkan penyelesaian audit secepat mungkin dan tidak akan menunda penerbitan laporan keuangan mereka. Dengan demikian, perusahaan yang memperoleh profit besar cenderung akan lebih tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangannya dibandingkan dengan perusahaan yang memperoleh profit kecil.

Untuk mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan dilihat dari EBIT (laba bersih sesudah pajak). Perusahaan yang mengumumkan rugi atau tingkat profitabilitas yang rendah, maka akan membawa reaksi negatif terhadap pasar dan turunnya penilaian atas kinerja perusahaannya. Sedangkan perusahaan yang

mengumumkan laba tinggi akan berdampak positif terhadap penilaian pihak lain atas kinerja perusahaannya.

Menurut Amani (2016) mengungkapkan bahwa tingkat profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay. Perusahaan yang memperoleh *good news* cenderung akan lebih tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangannya dibandingkan dengan perusahaan yang memperoleh *bad news*. Sedangkan menurut Kartika (2011) mengungkapkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap audit delay.

2.9.4 Hubungan solvabilitas terhadap audit delay

Solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Solvabilitas suatu perusahaan dapat diukur dengan membandingkan jumlah hutang dengan jumlah aktiva. Proporsi hutang yang besar terhadap total aktiva akan meningkatkan kecenderungan kerugian dan dapat meningkatkan kehati-hatian auditor terhadap laporan keuangan yang akan diaudit, sehingga penyelesaian audit atas laporan keuangan dapat mengalami keterlambatan. Hal ini dikarenakan tingkat hutang akan meningkatkan risiko keuangan perusahaan.

Menurut Kartika (2011) solvabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajiban perusahaan. Perusahaan dikatakan mampu apabila perusahaan mempunyai aktiva yang cukup untuk membayar semua hutangnya. Sebaliknya, apabila hutang lebih besar dari aktiva maka perusahaan akan mengakibatkan kerugian dan dapat meningkatkan kehati-hatian dari auditor terhadap laporan keuangan yang akan diaudit. Kehati-hatian tersebut akan mengakibatkan keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan kepada publik.

Menurut Dura (2017), solvabilitas berpengaruh terhadap audit report lag atau audit delay. Hal ini mengidentifikasi bahwa tingginya jumlah hutang yang dimiliki perusahaan akan menyebabkan proses audit yang lebih panjang.

Berbeda dengan Sumartini dan Widhiyani (2014) yang menyatakan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap audit report lag atau audit delay.

2.10 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat (Sujarweni,2015: 43). Berdasarkan hubungan antar variabel, maka disusun hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Opini Audit berpengaruh terhadap *Audit Delay*.

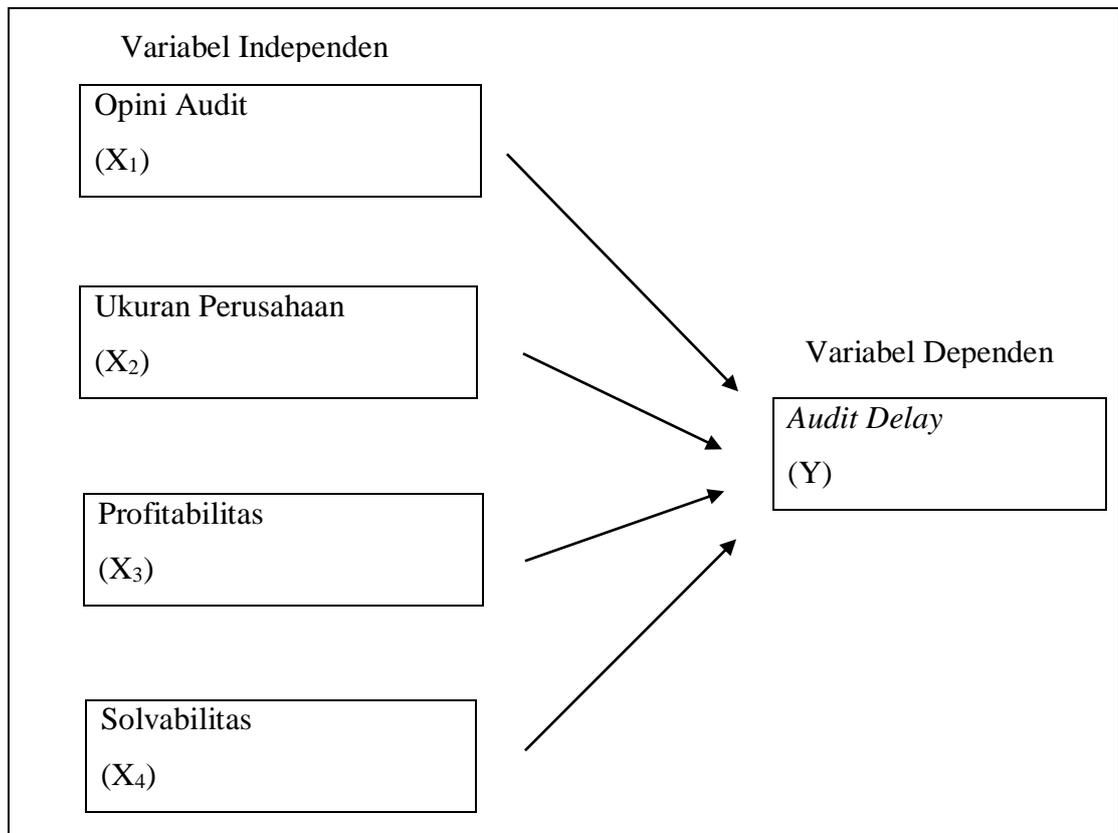
H₂ : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Audit Delay*.

H₃ : Profitabilitas berpengaruh terhadap *Audit Delay*.

H₄ : Solvabilitas berpengaruh terhadap *Audit Delay*.

2.11 Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini mencoba menguji pengaruh opini audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi dan sub sektor plastik dan kemasan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 hingga 2016. Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber: Hasil olah penulis